

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	.....
Media Online	Suara Merdeka

Wilayah: Kabupaten Rembang

Halaman 16

## Denda Proyek Mal Belum Dibayar



**DAPAT DENDA :** Denda keterlambatan pengerjaan proyek Mal Pelayanan Publik menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan harus dibayarkan ke kas daerah.

**REMBANG** - Rekanan pengerja proyek Mal Pelayanan Publik (MPP) Rembang belum membayarkan denda keterlambatan pengerjaan. Denda tersebut menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit beberapa waktu lalu.

Sejatinnya, Pemkab Rembang sudah menerima penghargaan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Daerah dari BPK tahun ini. Penghargaan atas opini tersebut sudah diterimakan melalui Bupati Rembang Abdul Hafidz, pada 27 Mei 2022 lalu di Semarang.

Informasi yang disampaikan Kepala Inspektorat Kabupaten Rembang Mustain, denda atas keterlambatan penyelesaian proyek senilai Rp 3.674.947.570 tersebut mencapai sekitar Rp 300 juta.

### Temuan BPK

Denda keterlambatan tersebut secara regulasi harus disetorkan ke kas daerah, karena menjadi temuan BPK. Mustain saat dikonfirmasi menyatakan, sampai saat ini belum mendapatkan laporan perihal pemba-

yanan denda pengerjaan proyek MPP oleh rekanan.

"Belum (terbayarkan) Mas. Sekitar Rp 300 juta. Maaf datanya belum saya pegang," kata Mustain.

Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Fahrudin saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu pasti apakah temuan BPK soal denda proyek MPP sudah ditindaklanjuti atau belum. Sebab, yang memiliki tupoksi soal hal itu adalah Inspektorat.

"Yang tahu pasti Inspektorat, karena sampai saat ini belum ada laporan ke saya," terang Fahrudin.

Menurut Fahrudin, secara aturan waktu penyelesaian temuan BPK adalah 60 hari setelah LHP keluar. Sementara itu, sampai saat ini belum bisa dipastikan berapa lama keterlambatan pengerjaan proyek MPP.

Pengguna Anggaran proyek MPP, Agus Salim menyatakan, baru menerima surat untuk tindak lanjut atas LHP BKP dari Bupati Rembang pada Senin (13/6) lalu. Rencananya ia akan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) untuk bertanggungjawabkan denda sebagaimana yang tertuang dalam LHP BPK. (lee-30)